

TESIS

**PENGARUH JUMLAH BELANJA MODAL DAN BELANJA
BARANG JASA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) MELALUI RASIO EFEKTIVITAS PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONE SOPPENG WAJO DAN
SIDRAP**

**THE EFFECT OF TOTAL CAPITAL EXPENDITURES AND
EXPENDITURES ON GOODS AND SERVICES ON ORIGINAL
REGIONAL INCOME THROUGH THE EFFECTIVENESS
RATIO IN THE REGIONAL GOVERNMENTS OF BONE
SOPPENG WAJO AND SIDRAP REGENCIES**

RISKI NADIA PUTRI

A022222005



**PROGRAM MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENGARUH JUMLAH BELANJA MODAL DAN BELANJA
BARANG JASA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) MELALUI RASIO EFEKTIVITAS PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONE SOPPENG WAJO DAN
SIDRAP**

**THE EFFECT OF TOTAL CAPITAL EXPENDITURES AND
EXPENDITURES ON GOODS AND SERVICES ON ORIGINAL
REGIONAL INCOME THROUGH THE EFFECTIVENESS
RATIO IN THE REGIONAL GOVERNMENTS OF BONE
SOPPENG WAJO AND SIDRAP REGENCIES**

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister
disusun dan diajukan oleh

RISKI NADIA PUTRI

A022222005



**PROGRAM MAGISTER SAINS MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH JUMLAH BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG JASA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI RASIO EFEKTIVITAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE SOPPENG WAJO DAN SIDRAP

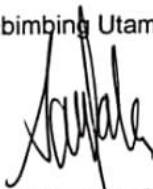
Disusun dan diajukan oleh:

RISKI NADIA PUTRI
NIM A022222005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal **14 Agustus 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsu Alam, S.E., M.Si
NIP 196007031992031001

Pembimbing Pendamping



Andi Aswan, S.E., M.BA., Ph.D
NIP 197705102006041003

Ketua Program Studi
Magister sains Manajemen



Prof. Dr. Abdul Razak Munir, SE., M.Si., M.Mktg., C.MP., CMA
NIP 196806291994031002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir., S.E., M.Si., CIPM.
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Nadia Putri
NIM : A022222005
Program Studi : Sains Manajemen
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**PENGARUH JUMLAH BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG JASA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI RASIO
EFEKTIVITAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE SOPPENG
WAJO DAN SIDRAP**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2024

Yang Menyatakan,



Riski Nadia Putri

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dan puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, hidayahNya serta Maha kasih dan sayangNya kepada penulis sehingga Tesis yang berjudul **“PENGARUH JUMLAH BELANJA MODAL DAN BELANJA BARANG JASA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI RASIO EFEKTIVITAS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE SOPPENG WAJO DAN SIDRAP”** dapat diselesaikan

Penulis menyadari, bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun material. Oleh karna itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini terutama:

1. Kedua Orang tua penulis. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak Munir, SE., M.Si., M.Mktg., C.MP,CMA selaku ketua program studi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof.Dr. Syamsu Alam, SE., M.si. selaku pembimbing I dan bapak andi aswan S.E., MBA.,Ph.D selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

5. Bapak Dr. Muhammad Sobarsyah, SE., M. Si., Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, dan bapak Dr. Nur Alamsyah SE., M.Si selaku tim penguji peneliti, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan pengetahuan yang telah diberikan.
6. Teman seperjuangan. Terima kasih atas supportnya sampai hari ini
Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen keuangan. penulis berharap semoga segala bentuk kegiatan kita bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Makassar, Juli 2024

Penulis

Riski Nadia Putri

ABSTRAK

RISKI NADIA PUTRI. *Pengaruh Jumlah Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Rasio Efektivitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap* (dibimbing oleh Syamsu Alam dan Andi Aswan).

Penelitian ini bertujuan menganalisis belanja modal dan belanja barang jasa terhadap pendapatan asli daerah melalui Wasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan bantuan alat spss versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap. Belanja barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PAD. Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap rasio efektivitas di Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap. Belanja barang dan jasa juga tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio efektivitas. Rasio efektivitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap PAD. Belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rasio efektivitas. Belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD melalui rasio efektivitas.

Kata kunci: belanja modal, belanja barang jasa, pad, rasio efektivitas



ABSTRACT

RISKI NADIA PUTRI. *The Effect of Total Capital Expenditures and Expenditures on Goods and Services on Original Regional Income through Effectiveness Ratio in Regional Governments of Bone, Soppeng, Wajo and Sidrap Regencies* (supervised by Syamsu Alam and Andi Aswan)

The research aims at disclosing the total capital expenditures and expenditures on the goods and services on the original regional income through the effectiveness ratio in the regional governments of Bone, Soppeng, Wajo, and Sidrap Regencies. The research used quantitative method. the analytical tool used was the path analysis with the help of SPSS version 26. The research result indicates that the capital expenditure does not have the significant effect on the Regional Original Income (PAD) in Bone, Soppeng, Wajo and Sidrap Regencies. The goods and services expenditures have the significant and positive effect on the Regional Original Income (PAD). The capital expenditure has the significant and negative effect on the effectiveness ratio in Bone, Soppeng, Wajo and Sidrap Regencies. The goods and services expenditures also have no significant effect on the effectiveness ratio. The effectiveness ratio has the significant and negative effect on the Regional Original Income (PAD). The capital expenditure affects the Regional Original Income (PAD) through the effectiveness ratio. The goods and services expenditures have no significant effect on the Regional Original Income (PAD) through the effectiveness ratio.

Key words: capital expenditure, goods and services expenditures, Regional Original Income (PAD), effectiveness ratio



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2.1.2 Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.1.3 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
2.2 Belanja Modal	24
2.2.1 Pengertian Belanja Modal	24
2.2.2 Kriteria Belanja Modal	27
2.2.3 Jenis-jenis Belanja Modal	28
2.3 Belanja Barang dan Jasa	30
2.3.1 Pengertian Belanja Barang dan Jasa	30
2.3.2 Tujuan Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa	31
2.3.3 Alokasi Belanja Barang dan Jasa	32
2.4 Rasio Efektivitas	34
2.4.1 Pengertian Rasio Efektivitas	34
2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	35
2.4.3 Manfaat dan Rumus Menghitung Rasio Efektivitas	36
2.5 Penelitian Terdahulu	38

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	50
3.1 Kerangka Konseptual	50
3.2 Hipotesis	52
BAB IV METODE PENELITIAN	54
4.1 Desain dan Pendekatan Penelitian	54
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	54
4.3 Populasi dan Sampel	55
4.3.1 Populasi	55
4.3.2 Sampel	55
4.4 Jenis Dan Sumber Data	56
4.4.1 Jenis data	56
4.4.2 Sumber data	56
4.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	57
4.6 Teknik pengumpulan Data	60
4.7 Teknik Analisis Data	61
4.7.1 Analisis Deskriptif	61
4.7.2 Uji Asumsi Klasik	62
4.7.3 Analisis Jalur	65
4.7.4 Pengujian Hipotesis	67
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	72
5.1.1 Kabupaten Bone	72
5.1.2 Kabupaten Soppeng	74
5.1.3 Kabupaten Wajo	76
5.1.4 Kabupaten Sidrap	77
5.2 Deskripsi Data Penelitian	79
5.2.1 Belanja Modal	79
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa	82
5.2.3 Pendapatan Asli Daerah	85
5.2.4 Rasio Efektivitas	89
5.3 Hasil Analisis	92
5.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	92
5.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	94
5.3.3 Hasil Analisis Jalur	99
5.3.4 Hasil Uji Hipotesis	102
BAB VI PEMBAHASAN	109
6.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah	109
6.2 Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pendapatan Asli Daerah	111
6.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Rasio Efektivitas	112
6.4 Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Rasio Efektivitas	114

6.5	Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Pendapatan Asli Daerah	116
6.6	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Rasio Efektivitas	119
6.7	Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Rasio Efektivitas	122
BAB VII PENUTUP		125
7.1	Kesimpulan	125
7.2	Implikasi	127
7.3	Keterbatasan Penelitian	129
7.4	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA		131
LAMPIRAN		138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya	38
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	57
Tabel 5.1. Perkembangan Belanja Modal 2014-2023 (Nilai <i>dalam miliar rupiah</i>)	80
Tabel 5.2. Perkembangan Belanja Barang dan Jasa 2014-2023 (Nilai <i>dalam miliar rupiah</i>)	83
Tabel 5.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 2014-2023 (Nilai <i>dalam miliar rupiah</i>)	86
Tabel 5.4. Perkembangan Rasio Efektivitas 2014-2023 (Nilai <i>dalam persentase</i>)	89
Tabel 5.5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	92
Tabel 5.6. Hasil Uji Normalitas	95
Tabel 5.7. Hasil Uji Multikolinieritas	96
Tabel 5.8. Hasil Uji Autokorelasi	98
Tabel 5.9. Hasil Estimasi Persamaan Regresi Model I	99
Tabel 5.10. Hasil Estimasi Persamaan Regresi Model II	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Anggaran Belanja Modal Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap	4
Gambar 1.2. Grafik Pertumbuhan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap	6
Gambar 1.3. Grafik Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap	8
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual	50
Gambar 4.1. Model Analisis Jalur (<i>path analysis</i>)	65
Gambar 4.2. Konsep <i>Sobel Test</i>	69
Gambar 5.1. Hasil Uji Heterokedastisitas	97
Gambar 5.2. Diagram Hasil Analisis Jalur	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data	139
Lampiran 2. Output Hasil Pengolahan Data SPSS	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan elemen fundamental yang menjadi pendorong pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Kemajuan sebuah negara dapat diukur dari seberapa stabil pertumbuhannya di berbagai daerah yang tergabung dalam wilayah negara tersebut. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah memainkan peran yang sangat signifikan. Tingkat kemajuan daerah dapat tergambarkan dari efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki dampak yang positif terhadap kemajuan daerah. Kemampuan sebuah daerah untuk berkembang atau tidaknya sangat tergantung pada tata cara pengelolaan keuangannya. Sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dan transparan mampu mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peninjauan dan evaluasi terhadap alokasi dan penggunaan anggaran menjadi sangat penting. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, potensi-potensi ekonomi di suatu daerah dapat dimaksimalkan. Hal ini mencakup pemanfaatan sumber daya lokal, stimulasi investasi, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, pengelolaan

keuangan yang kurang optimal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan menyebabkan stagnasi atau kemunduran. Dalam upaya memajukan sebuah negara, perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan-kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, negara dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari potensi ekonomi yang dimilikinya, sehingga mencapai tingkat pertumbuhan dan pembangunan yang diharapkan.

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya seringkali melebihi satu tahun anggaran, akan menambah aset pemerintah, dan akan menambah biaya operasional dan pemeliharaan anggaran rutin. (Ni Putu Gina Sukma dan Ida Bagus, 2018). Belanja modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pengeluaran untuk aset tetap seperti bangunan, peralatan, kendaraan, furnitur. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk meningkatkan aset dengan jangka panjang, termasuk beberapa pengeluaran pemeliharaan aset untuk memperpanjang atau meningkatkan umur layanan, meningkatkan kualitas dan kuantitas aset (Darise, 2008).

Selain belanja modal, belanja barang dan jasa juga merupakan komponen penting dalam anggaran pemerintah daerah yang berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas layanan publik. Peningkatan dalam kedua jenis belanja ini diharapkan dapat

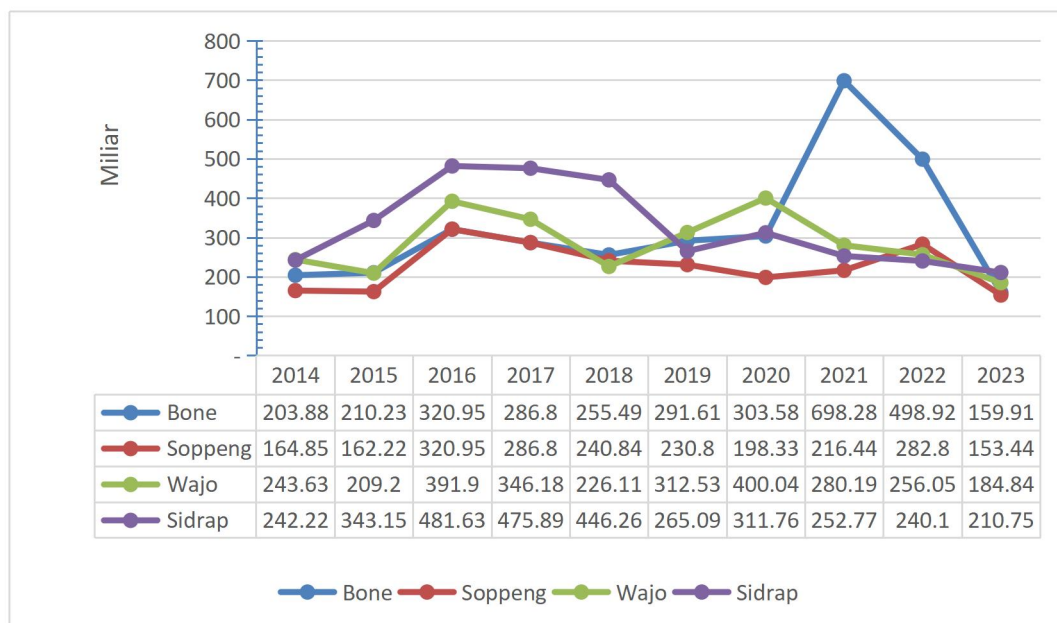
meningkatkan PAD dengan cara meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Rasio efektivitas, sebagai ukuran efisiensi penggunaan anggaran, menjadi indikator penting dalam menilai seberapa baik alokasi belanja modal dan belanja barang dan jasa tersebut mampu meningkatkan PAD.

Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap adalah empat kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Setiap kabupaten ini memiliki karakteristik geografis, demografis, dan ekonomi yang berbeda namun saling berhubungan dalam pembangunan daerah. Kabupaten Bone, yang dikenal sebagai salah satu kabupaten terbesar di Sulawesi Selatan, memiliki wilayah yang luas dan beragam dengan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Soppeng, dengan luas wilayah yang lebih kecil, terkenal dengan potensi perkebunan dan kehutanan serta warisan budayanya yang kaya. Wajo, di sisi lain, memiliki sejarah panjang dalam perdagangan dan kerajinan sutra, serta merupakan pusat produksi perikanan di kawasan ini. Sidrap, yang terkenal sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan, memiliki kontribusi besar dalam sektor pertanian dan peternakan.

Keempat kabupaten ini saling berhubungan dalam hal pembangunan daerah, di mana pertumbuhan ekonomi satu kabupaten dapat berdampak pada kabupaten lainnya. Mereka bekerja sama dalam berbagai proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi regional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan ini memungkinkan

adanya sinergi dalam pembangunan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sulawesi Selatan. Meski dengan karakteristik yang unik, Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap bersama-sama berkontribusi dalam membangun provinsi ini menjadi lebih maju dan berkembang.

Adapun hasil pengamatan awal mengenai anggaran belanja modal dalam 10 tahun terakhir pada keempat daerah tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Sumber: Portal Data Kemenkeu (2024)

Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Anggaran Belanja Modal Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap

Berdasarkan grafik pertumbuhan anggaran belanja modal Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap dari tahun 2014 hingga 2023, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam alokasi belanja modal di setiap kabupaten.

Kabupaten Bone menunjukkan kenaikan yang stabil dari tahun

2014 hingga 2016, dengan puncaknya pada tahun 2021 sebesar 698,28 miliar rupiah. Setelah itu, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 dan 2023, dengan anggaran sebesar 498,92 miliar rupiah dan 159,91 miliar rupiah.

Kabupaten Soppeng memiliki pola yang relatif stabil namun cenderung menurun. Setelah peningkatan signifikan pada tahun 2016 hingga 2017, anggaran belanja modal mengalami penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 153,44 miliar rupiah.

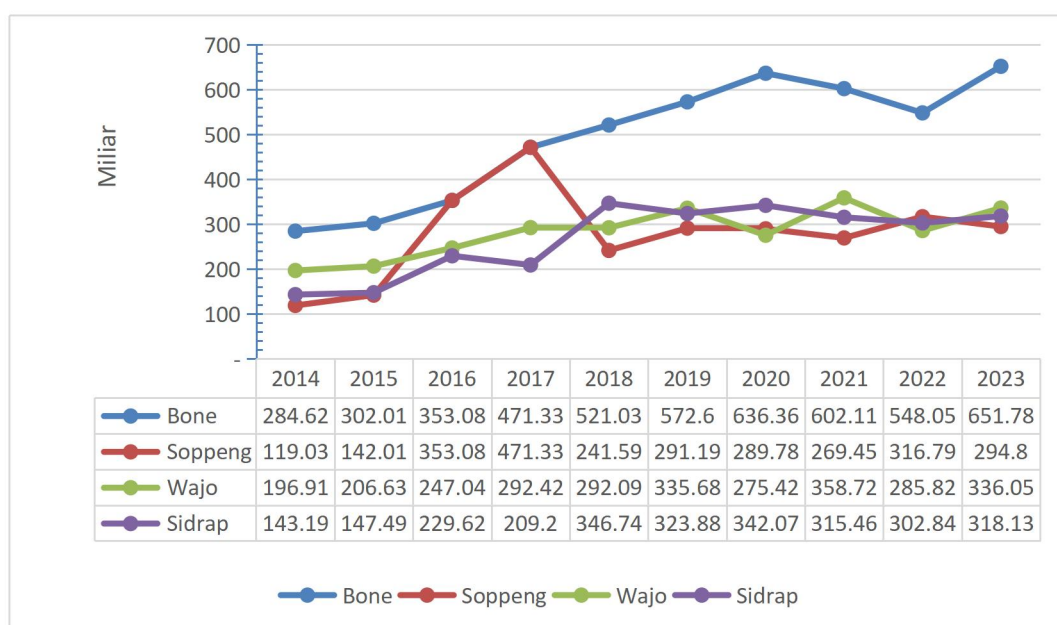
Kabupaten Wajo mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 sebesar 400,04 miliar rupiah. Namun, setelah itu, anggaran mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2023 menjadi 184,84 miliar rupiah.

Kabupaten Sidrap menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2014 hingga 2017, dengan puncaknya pada tahun 2016 sebesar 481,63 miliar rupiah. Setelah itu, anggaran belanja modal mengalami penurunan dengan beberapa fluktuasi kecil, berakhir pada angka 210,75 miliar rupiah di tahun 2023.

Dengan demikian, data pada grafik pertumbuhan anggaran belanja modal Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap ini mencerminkan adanya perubahan prioritas dan alokasi anggaran di setiap kabupaten yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan

kebijakan pemerintah daerah, kebutuhan pembangunan infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan keuangan daerah

Selanjutnya, untuk hasil pengamatan mengenai anggaran belanja barang dan jasa dalam 10 tahun terakhir pada keempat daerah, yaitu Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Sumber: Portal Data Kemenkeu (2024)

Gambar 1.2. Grafik Pertumbuhan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap

Berdasarkan grafik pertumbuhan anggaran belanja barang dan jasa Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap dari tahun 2014 hingga 2023, terlihat bahwa terdapat variasi dan fluktuasi dalam alokasi anggaran untuk masing-masing kabupaten selama periode tersebut.

Kabupaten Bone menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2014 hingga 2019, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2016 dan 2017. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2020 sebesar 636,36

miliar rupiah, anggaran belanja barang dan jasa sedikit menurun pada tahun 2021 dan 2022, sebelum akhirnya meningkat lagi pada tahun 2023 mencapai 651,78 miliar rupiah.

Kabupaten Soppeng memiliki tren yang berfluktuasi dengan peningkatan tajam pada tahun 2016 dan penurunan yang signifikan pada tahun 2018. Setelah penurunan tersebut, anggaran kembali menunjukkan tren yang tidak stabil, dengan penurunan pada tahun 2020 dan sedikit peningkatan pada tahun 2021, serta fluktuasi kecil hingga tahun 2023 mencapai 294,8 miliar rupiah.

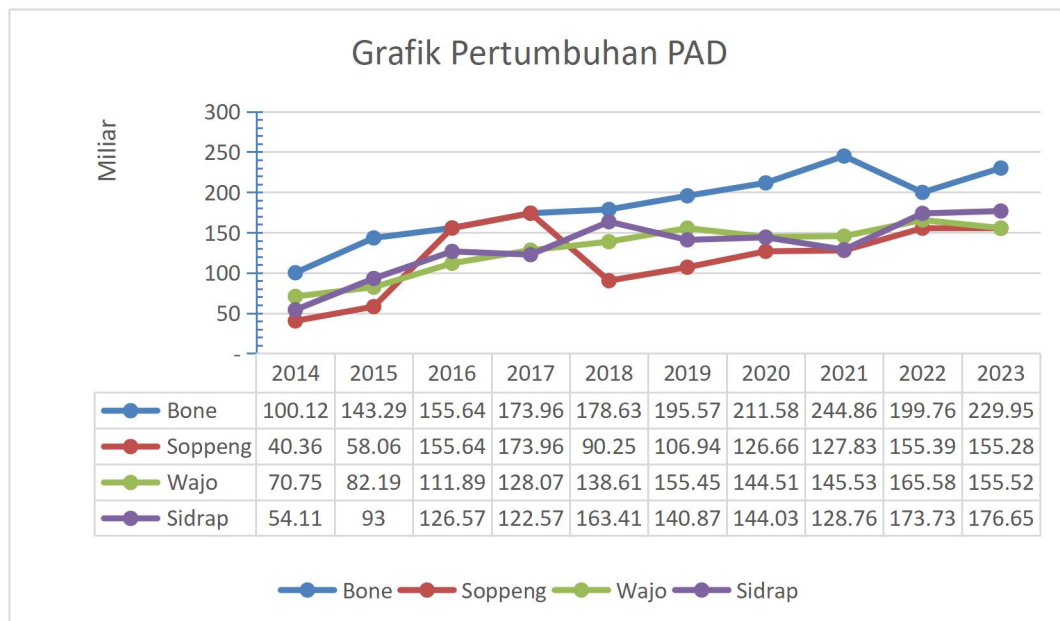
Kabupaten Wajo memperlihatkan peningkatan yang stabil dari tahun 2014 hingga 2019. Namun, setelah mencapai puncak pada tahun 2021 sebesar 358,72 miliar rupiah, anggaran mengalami penurunan pada tahun 2022 dan sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 336,05 miliar rupiah.

Kabupaten Sidrap menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan kabupaten lainnya. Setelah peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 dan 2018, anggaran mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2023, anggaran belanja barang dan jasa relatif stabil dengan sedikit peningkatan pada tahun 2023 mencapai 318,13 miliar rupiah.

Dengan demikian, data pada grafik pertumbuhan anggaran belanja barang dan jasa Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap ini mencerminkan bahwa keempat kabupaten memiliki dinamika yang

berbeda dalam alokasi anggaran belanja barang dan jasa. Perubahan anggaran ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan pembangunan daerah, prioritas pemerintah daerah, serta kondisi ekonomi dan keuangan masing-masing kabupaten.

Kemudian, untuk hasil pengamatan mengenai anggaran pendapatan asli daerah dalam 10 tahun terakhir pada keempat daerah, yaitu Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Sumber: Portal Data Kemenkeu (2024)

Gambar 1.3. Grafik Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap

Berdasarkan grafik pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap dari tahun 2014 hingga 2023, terlihat adanya tren yang bervariasi pada masing-masing kabupaten selama periode tersebut.

Kabupaten Bone memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten

dari tahun 2014 hingga 2019. Setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, PAD kembali meningkat pada tahun 2021 dan seterusnya, mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 229,95 miliar rupiah.

Kabupaten Soppeng menunjukkan pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Setelah peningkatan signifikan pada tahun 2015 dan 2016, terjadi penurunan pada tahun 2018. Meskipun mengalami penurunan lagi pada tahun 2020, PAD Soppeng menunjukkan tren peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, meskipun tidak secepat kabupaten lainnya, dan mencapai 155,28 miliar rupiah pada tahun 2023.

Kabupaten Wajo menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2014 hingga 2019. Namun, setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, PAD Wajo kembali meningkat pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 165,58 miliar rupiah, sebelum sedikit menurun menjadi 155,52 miliar rupiah pada tahun 2023.

Kabupaten Sidrap memperlihatkan pertumbuhan yang cukup stabil dengan beberapa fluktuasi. Setelah peningkatan signifikan pada tahun 2015 dan 2016, PAD Sidrap mengalami penurunan pada tahun 2017. Namun, tren meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya, dengan puncak pada tahun 2022 sebesar 173,73 miliar rupiah, dan sedikit peningkatan lagi pada tahun 2023 menjadi 176,65 miliar rupiah.

Dengan demikian, data pada grafik pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap ini mencerminkan dinamika pertumbuhan PAD yang berbeda-beda di

keempat kabupaten tersebut. Kabupaten Bone menunjukkan tren peningkatan yang paling konsisten dan signifikan, sementara kabupaten lainnya mengalami fluktuasi yang lebih besar. Variasi dalam pertumbuhan PAD ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi lokal, dan kemampuan masing-masing kabupaten dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Sumawan dan Sukartha (2016), pertumbuhan pendapatan daerah yang tinggi setiap tahun tidak hanya mencerminkan tingkat kekayaan finansial yang signifikan di wilayah tersebut, tetapi juga mengindikasikan kinerja yang kuat dari pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangannya secara optimal. Fenomena ini menegaskan bahwa efisiensi dalam penggunaan anggaran dan alokasi yang tepat sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memperkuat posisi keuangan pemerintah daerah.

Potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah seharusnya dapat dieksplorasi dengan lebih baik guna memperbesar pemasukan dari sumber pendapatan utama daerah, seperti pajak dan retribusi. Upaya ini akan membantu meningkatkan kemandirian finansial daerah, meminimalkan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, serta mengurangi risiko terhadap fluktuasi kebijakan fiskal nasional.

Menurut Taras dan Artini (2017), pemanfaatan potensi daerah menjadi kunci penting dalam meningkatkan pendapatan utama daerah.

Dalam konteks ini, pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, peningkatan investasi, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam menjadi strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Terlebih lagi, dengan adanya desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat, seperti yang diungkapkan oleh Julitawati et al. (2012), pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam mengambil keputusan terkait kebijakan fiskal lokal. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui kebijakan yang bersifat lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal.

Adapun hasil penelitian terdahulu terkait belanja modal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) oleh Tampubolon (2023) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,966 > 2,447$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari alfa ($0,041 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal secara signifikan meningkatkan PAD. Apriliyanti (2017) juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD, yang ditunjukkan oleh koefisien positif dalam analisisnya. Sedangkan dalam penelitian Rahman (2018), menunjukkan hasil yang sebaliknya, dimana PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, menunjukkan bahwa daerah dengan PAD yang lebih besar belum mampu memberikan kontribusi yang memadai terhadap belanja modal. Putra (2018) juga menemukan bahwa belanja modal

berpengaruh negatif terhadap PAD, menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal tidak selalu dikaitkan dengan peningkatan PAD.

Kemudian penelitian terdahulu terkait belanja barang jasa terhadap pendapatan asli daerah (PAD) oleh Mariani (2022) menemukan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap PAD, mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk barang dan jasa meningkatkan pendapatan asli daerah. Ferdian (2013) juga menemukan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap PAD, memperkuat argumen bahwa belanja operasional dapat meningkatkan kinerja fiskal daerah. Sedangkan, disisi lain dalam penelitian Muskitta (2022), menemukan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap PAD. Nurhaeni (2019) juga menemukan hasil yang serupa, bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran operasional tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan dalam meningkatkan PAD.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya terlihat bahwa terdapat inkonsistensi hasil dalam temuan penelitian. Inkonsistensi hasil dalam penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan mengenai pengaruh belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap PAD. Temuan yang berbeda disebabkan oleh variasi dalam kondisi regional, kebijakan lokal, dan kapasitas manajerial daerah. Kabupaten yang berada pada tahap pembangunan yang berbeda mungkin menunjukkan hasil yang berbeda dalam hal pengaruh belanja modal dan

barang/jasa terhadap PAD. Selain itu, daerah yang sudah maju memperlihatkan pengaruh positif karena infrastruktur yang ada, sementara daerah yang masih berkembang mungkin tidak menunjukkan hasil yang sama.

Penelitian ini ingin mengeksplorasi rasio efektivitas sebagai variabel mediator yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Rasio efektivitas dapat memberikan cara baru mengenai bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran mempengaruhi hubungan antara belanja dan PAD. Analisis ini penting untuk memahami apakah belanja modal dan belanja barang/jasa digunakan secara optimal untuk meningkatkan PAD.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran rasio efektivitas dalam mediasi hubungan ini, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual seperti belanja modal dan belanja barang/jasa yang mempengaruhi PAD. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya meningkatkan kinerja fiskal dan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Jumlah Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Rasio Efektivitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan,

maka akan dapat disajikan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap?
2. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap?
4. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap?
5. Apakah rasio efektivitas berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap?
6. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap?
7. Apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, maka penelitian ini

bertujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja barang jasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.
4. Untuk menganalisis pengaruh belanja barang jasa terhadap rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.
5. Untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.
6. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.
7. Untuk menganalisis pengaruh belanja barang jasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap.

1.4 Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa

pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat terkait kinerja keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran umum dalam proses penelitian ini maka penulis membagi kedalam tiga sub pokok bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam rincian bab ini di uraikan dari deskripsi umum ke khusus yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam rincian bab ini di uraikan tentang tinjauan teori dan konsep penelitian dan tentang tinjauan empiris yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari kerangka konseptual dan hipotesis.

Bab IV Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu

penelitian , populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, metode analisis data, definisi operasional variable dan pengukuran

BAB V Hasil Penelitian

Bab ini memberikan gambaran tentang alat analisis yang digunakan serta hasil dari pengolahan data.

BAB VI Pembahasan

Hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, dalam bab ini penulis akan membahas tentang jumlah belanja modal dan belanja barang jasa terhadap pendapatan asli daerah (Pad) melalui rasio efektivitas pada pemerintah daerah kabupaten bone,soppeng dan wajo

BAB VII Penutup

Bagian ini merupakan penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan implikasi manajerial yang dapat dijadikan jawaban untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber PAD sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU No 33 Tahun 2004, berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah), lain-lain PAD yang pengelolaan kekayaan Sah.

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Pratiwi (2018: 35) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

2.1.2 Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada (Walintukan, dkk., 2021). Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah

daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya (Hadi, dkk., 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran sentral dalam membiayai kegiatan dan program pembangunan di tingkat daerah. Berikut penjelasan mengenai peran PAD dalam keuangan daerah (Aji, dkk., 2018):

1. Sumber Utama Pendapatan Daerah

PAD menjadi sumber utama pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal, seperti pajak, retribusi, hasil usaha daerah, dan penerimaan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

2. Dukungan Keuangan Pembangunan Lokal

PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, memberikan fleksibilitas dan otonomi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

3. Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan peran PAD yang signifikan, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan lokal tanpa terlalu tergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

4. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

PAD dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan penerimaan dari sektor-sektor ekonomi lokal, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

2.1.3 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2014) ada beberapa kelompok Pendapatan Asli Daerah yang dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Macam pajak daerah yaitu:

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Rumah Makan,
- c. Pajak tempat hiburan,
- d. Pajak reklame atau iklan,
- e. Pajak penerangan jalanan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c,
- g. Pajak lingkungan,
- h. Pajak mineral dan bukan bahan logam batuan,
- i. Pajak parkir,

- j. Pajak terhadap sarang burung wallet,
- k. Pajak bumi dan bangunan terhadap pedesaan serta Perkotaan,
- l. BPHTB (Pajak perolehan hak atas tanah serta bangunan).

2. Retribusi Daerah

Menurut Halim (2014) retribusi daerah adalah pendapatan suatu daerah yang didapatkan dari retribusi

Retribusi daerah yang dapat dipungut pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota terbagi atas tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan serta diserahkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan atau manfaat umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat daerah maupun pemerintah daerah.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ialah suatu pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dengan mempercayai prinsip menguntungkan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat daerah atau pemerintah daerah itu sendiri dimaksudkan untuk pengendalian atau pemeriksaan atas suatu kegiatan pemanfaatan ruang, pendayagunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, serta fasilitas yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada

didaerah tersebut.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yakni penerimaan suatu daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah terbagi atas tiga, yaitu :

- a. bagian keuntungan atau laba atas pengikutan dana serta kekayaan pada perusahaan milik daerah atau BUMD.
- b. bagian keuntungan atau laba atas pengikutan dana serta kekayaan pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN.
- c. bagian keuntungan atau laba atas pengikutan dana serta kekayaan pada perusahaan milik swasta atau sekelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ini merupakan pendapatan penerimaan pemerintah yang bersumber dari lain-lain milik pemerintah yang ada di daerah. Pendaparan ini terdiri atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

- a. hasil penjualan terhadap kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik secara tunai ataupun secara angsuran.
- b. jasa giro.
- c. pendapatan bunga.
- d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah.
- e. penerimaan komisi atau potongan akibat adanya pengadaan barang

serta jasa oleh pemerintah daerah.

- f. penerimaan suatu keuntungan dari selisih nilai tukar mata uang rupiahmaupun mata uang asing.
- g. Pendapatan denda berdasarkan keterlambatan pelaksanaan kerja.
- h. pendapatan denda pajak.
- i. pendapatan dena retribusi.
- j. pendapatan hasil eksekusi ataupun jaminan.
- k. pendapatan dari pengembalian.
- l. fasilitas social maupun fasilitas umum.
- m.pendapatan terhadap penyelenggaraan Pendidikan serta pelatihan.
- n. pendapatan terhadap badan layanan umum daerah (BLUD).

Setiap komponen PAD memiliki peran penting dalam menyumbang pada penerimaan keuangan daerah. Pajak dan retribusi mencerminkan kontribusi masyarakat, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah melibatkan aspek ekonomi dan bisnis daerah. Sementara itu, menurut Syam, dkk. (2023), bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya.

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan pemerintah daerah harus dapat menggilir belanja dengan meningkatkan alokasi belanja modal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan produktivitas masyarakat. Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang membawa manfaat sepanjang tahun anggaran, menambah kekayaan daerah dan menambah beban usaha umum.

Belanja modal pelayanan publik digunakan untuk membiayai kegiatan investasi peningkatan infrastruktur publik yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Belanja modal terbagi atas belanja modal kelembagaan, belanja modal pembangunan irigasi, belanja tanah, jalan dan jembatan, dan belanja modal yang dapat digunakan untuk pelayanan publik sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Setiawan, 2019).

Menurut (Halim, 2007), belanja modal adalah pengeluaran yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan pendapatan selama beberapa periode akuntansi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dianggarkan yang terjadi selama suatu periode akuntansi untuk memperoleh aset lain guna penyediaan manfaat lain. Belanja modal ini terkait dengan perencanaan keuangan jangka panjang, pembiayaan pemeliharaan aktiva tetap, sehingga terjadi belanja modal.

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang

manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Setiawina & Arsa, 2016). Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. (Huda & Sumiati, 2019).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli (Rarun, dkk., 2021). Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD (Japar, dkk. 2022).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Eka & Nur, 2017).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan

modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Eka & Nur, 2017).

2.2.2 Kriteria Belanja Modal

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, menyebutkan bahwa suatu belanja masuk dalam kriteria sebagai belanja modal jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
4. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

2.2.3 Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Termasuk belanja modal untuk akuisisi tanah, bangunan dan struktur, bangunan dan struktur, peralatan dan aset tidak berwujud.

**Belanja modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin +
belanja konstruksi dan konstruksi + belanja jalan,
irigasi dan jaringan + belanja aset tetap lainnya.**

Dalam standar akuntansi pemerintah belanja modal terdiri atas lima, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk pengadaan, pembelian, penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurusan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat serta pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan peroleh hak atas tanah sampai tanah yang ditujui dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin ialah biaya yang digunakan untuk penambahan dan peningkatan daya tampung peralatan mesin dan inventaris kantor yang memberikan keuntungan lebih dari 12 (dua belas) bulan serta peralatan mesin siap pakai.

3. Belanja modal Gedung dan bangunan

Belanja modal Gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan Gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai Gedung serta bangunan siap dalam kondisi pakai.

4. Belanja modal, jalan, irigasi, serta jaringan.

Belanja modal, jalan irigasi serta jaringan merupakan pengeluaran biaya yang dipergunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, serta perawatan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan.irigasi serta jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi serta jaringan yang dimaksud siap pakai.

5. Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisiki adalah pengeluaran atau biaya yang dipergunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan dan perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam belanja modal tanah, peralatan, mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi serta mesin.

2.3 Belanja Barang dan Jasa

2.3.1 Pengertian Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa umumnya dianggarkan untuk membiayai operasional dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah seperti belanja untuk alat tulis kantor, perjalanan dinas pegawai, dan pemeliharaan aset.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dilingkungan pemerintahan yang nilai kegunaannya kurang dari satu tahun dalam periode akuntansi dan/atau pemakaian jasa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah suatu wilayah. Ketika belanja barang dan jasa dipenuhi dengan semestinya maka pegawai pemerintahan akan dapat memaksimalkan pelayanan publik (Pangestu, 2018).

Menurut peraturan Kementrian Keuangan nomor 110/ PMK 02 tahun 2018, tentang klasifikasi anggaran, belanja barang dan jasa adalah untuk menampung pembelian barang dan/jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/jasa yang dipasarkan maupun yang tidak di pasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Belanja barang dan jasa digunakan untuk belanja barang operasional, Belanja barang non operasional, Belanja Badan Layanan Umum (BLU), dan Belanja barang untuk masyarakat atau kelompok lain.

2.3.2 Tujuan Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa

Berdasarkan peraturan Kementrian Keuangan nomor 62 tahun 2023, Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, menyebutkan bahwa pengeluaran Belanja Barang dan Jasa dirancang untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan atau tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah (Pemda). Jenis pengeluaran ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti kegiatan operasional dan non-operasional, pengadaan barang pengganti pajak dalam rangka hibah Millennium Challenge Corporation (MCC), kontribusi pada organisasi internasional dan trust fund, serta belanja barang yang menghasilkan

persediaan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional.

Belanja barang meliputi kegiatan operasional, seperti belanja untuk keperluan perkantoran, pengadaan bahan makanan, pengiriman surat dinas, dan keperluan atase pertahanan luar negeri. Selain itu, juga mencakup belanja barang untuk kegiatan non-operasional, seperti belanja bahan, belanja rugi selisih kurs uang persediaan, dan belanja dalam rangka refund dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Selanjutnya, belanja barang juga mencakup belanja kontribusi pada organisasi internasional dan trust fund, serta belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non-operasional.

Sementara itu, belanja jasa mencakup berbagai jenis layanan, seperti langganan daya dan jasa, pos dan giro, konsultan, sewa, jasa profesi, jasa kepada Badan Layanan Umum (BLU), dan berbagai jenis jasa lainnya. Jenis pengeluaran ini juga mencakup belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis atau masa manfaat, belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, serta belanja barang BLU yang termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU

2.3.3 Alokasi Belanja Barang dan Jasa

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Kementerian Keuangan nomor 62 tahun 2023, Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mencakup beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam menetapkan anggaran untuk berbagai

keperluan operasional. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap poin alokasi tersebut:

1. Alokasi untuk Sewa Gedung

Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan pada kontrak sewa gedung yang berlaku. Jika Atase Teknis/Atase Pertahanan menempati gedung yang sama dan kontrak sewa gedung yang sama dengan kontrak sewa gedung kantor Perwakilan RI, alokasi anggarannya hanya pada RKA-K/L Satker Kantor Perwakilan RI.

2. Alokasi Operasional Pendukung Kerjasama Bilateral/Regional

Alokasi ini terdiri atas Biaya Operasional Kepala Perwakilan dan Representasi, serta biaya lainnya yang selama ini dialokasikan pada Operasional Pendukung Kerjasama Bilateral/Regional. Alokasi biaya tersebut harus sesuai dengan peruntukannya, dengan target kinerja dan rincian perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Alokasi Anggaran Biaya Representasi

Alokasi anggaran biaya representasi untuk Kepala Perwakilan dihitung maksimum 20% dari Tunjangan Pokok x 12 bulan, sedangkan untuk home staff lainnya dihitung maksimum 10% dari gaji pokok x 12 bulan.

4. Perjalanan Dinas pada Perwakilan RI di Luar Negeri

Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan, terdiri atas perjalanan dinas wilayah, perjalanan dinas multilateral, perjalanan dinas akreditasi, dan perjalanan dinas kurir. Besarnya anggaran perjalanan dinas ini

ditentukan berdasarkan jumlah pejabat yang melakukan perjalanan dinas, serta frekuensi perjalanan yang akan dilakukan. Besarnya tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan.

2.4 Rasio Efektivitas

2.4.1 Pengertian Rasio Efektivitas

Rahardjo Adisasmita (2011:170) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

M. Ramli Faud (2016:140) mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Efektivitas Keuangan

Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah merupakan indikator penting yang mengukur sejauh mana anggaran daerah digunakan secara efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio efektivitas keuangan daerah mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kapasitas manajerial, kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, serta faktor eksternal lainnya:

1. Kapasitas Manajerial dan Tata Kelola Pemerintahan

Kapasitas manajerial yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang baik sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran. Manajer publik yang kompeten dan sistem pengelolaan yang transparan dapat memastikan bahwa anggaran dialokasikan dan digunakan secara efisien. Studi oleh Auditya, dkk. (2013) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah berhubungan positif dengan kemampuan manajerial pemerintah daerah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi penggunaan anggaran .

2. Kebijakan Fiskal dan Perencanaan Anggaran

Kebijakan fiskal yang tepat dan perencanaan anggaran yang akurat juga memainkan peran penting. Anggaran yang direncanakan dengan baik, yang mencakup alokasi yang jelas untuk belanja modal dan belanja barang/jasa, dapat meningkatkan rasio efektivitas. Menurut

Halim (2008), kebijakan fiskal yang fokus pada prioritas pembangunan daerah dan efisiensi alokasi sumber daya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah .

3. Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasio efektivitas. Brown dan Jackson (1990) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran dapat memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan publik yang nyata, mengurangi kemungkinan misalokasi dan korupsi .

4. Kondisi Ekonomi Makro dan Lingkungan Eksternal

Kondisi ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas politik, juga mempengaruhi rasio efektivitas keuangan daerah. Ekonomi yang stabil dan tumbuh memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran dengan lebih baik dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih efisien. Penelitian oleh Bahl, et al.(1992) menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang kondusif berkontribusi pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah .

2.4.3 Manfaat dan Rumus Menghitung Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2008) menghitung rasio efektivitas keuangan daerah memiliki berbagai manfaat penting yang dapat membantu

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat tersebut:

1. Evaluasi Kinerja Keuangan

Rasio efektivitas memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangannya secara objektif. Dengan mengukur seberapa efektif anggaran digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

2. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Data dari rasio efektivitas memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi ini membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan prioritas belanja, mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk program-program yang memberikan nilai tambah terbesar bagi masyarakat.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Menghitung dan melaporkan rasio efektivitas meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau bagaimana anggaran digunakan dan seberapa efektif penggunaan tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini juga dapat

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

4. Pengoptimalan Anggaran

Rasio efektivitas membantu dalam pengoptimalan anggaran dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal. Pemerintah daerah dapat menilai apakah belanja modal dan belanja barang/jasa memberikan hasil yang diharapkan dan apakah ada cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tersebut.

Rasio efektivitas berfungsi merepresentasikan kemampuan dari pemerintah untuk merealisasikan seluruh perencanaan dibanding target sesuai potensi daerah. Formula rasio efektivitas yakni:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektivitas PAD menurut mahsum (2009) adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif;
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang;
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun proposal ini, penulis perlu mereferensi dari beberapa peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
----	----------	-------	---------------------	-------------------	------------------

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Juwenda Siska Gosa Agnes Lutherani Ch. P. Lapian Irawaty Masloman (2022)	Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado Tahun 2005- 2021	Belanja modal (X1) Belanja barang dan jasa (X2) Pertumbuhan ekonomi (Y)	penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	Husnun Karina Bilqis Nuwun Priyono (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015- 2020	Pendapatan Asli Daerah (X1) Belanja Modal (X2) Kinerja Keuangan (Y)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif.	Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
					pemerintah
3.	Pasa, S. R., Kawung, G. M., & Rorong, I. P. F. (2023)	Analisis Pengaruh Pad Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Ke Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Kota Bitung	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) Dana Transfer (X2) Belanja Modal (Y1) Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Y2)	analisis yang digunakan ialah analisis jalur dengan bantuan SPSS 26.	Hasil penelitian menunjukkan secara langsung Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan secara tidak langsung atau melalui belanja modal Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
					<p>ekonomi. Dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan secara tidak langsung atau melalui belanja modal Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
					Sedangkan dana transfer secara tidak langsung atau melalui belanja modal berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan.
4.	Dewi Nur Aini Putri Apria Ningsih Sri Rahma (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur	Kinerja Keuangan (X1) Alokasi Dana Desa (X2) Rasio Efektivitas (Y1) Rasio Pertumbuhan (Y2)	penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif.	hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah desa jati mulyo tanjung jabung timur sudah baik dalam mengelola keuangan alokasi dana desa. hal ini

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
					<p>dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas dikategorikan sudah efektif, karena rata-rata efektivitasnya diatas 90% yaitu 93%. sedangkan rasio pertumbuhan tumbuh secara secara negatif. rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja alokasi dana desa sebesar <50%.</p>
5.	Fatimah umar (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja modal Terhadap	Pendapatan Asli Daerah (X1) Belanja modal (X2)	Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
		Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa	Kinerja Keuangan (Y)		parsial tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010- 2021. Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
					<p>2010-2021. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji t untuk variable Pendapatan Asli Daerah dengan T hitung 0,792 < T tabel 2,262 dengan nilai signifikansi sebesar 0,449 < dari taraf signifikansi 0,050 dan koefisien regresi 8.726E-11 serta variabel Belanja Modal dengan T hitung 3,075 > T tabel 2,262 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 dari taraf signifikansi</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
					0,050 dengan koefisien regresi 1.979E-10. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa supaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah mampu membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya.
6	Dwi	Pengaruh	Pendapatan	Metode	Berdasarkan

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
	Saraswati (2020)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara	Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2)	analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan uji residual	tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel kinerja keuangan daerah mempunyai nilai sig sebesar 0,52 > nilai α sebesar 0,05 dan mempunyai nilai koefisien yang positif, sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah bukan merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat hubungan antara pendapatan asli daerah,

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
					dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonom
7	Afia Maulina (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (X_1) Dana Perimbangan (X_2)	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif	Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki hubungan positif yang tidak signifikan dengan variabel independen kinerja keuangan. Dengan tingkat signifikansi 0.525 untuk variabel ukuran pemerintah daerah
8	Az-zhara Shatila (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pengaruh	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) Dana Perimbangan	penelitian yang digunakan dalam penelitian ini	Berdasarkan hasil pengujian, variabel Sisa Lebih Pembiayaan

No	Peneliti	Judul	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
		Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal	(X_2)	adalah penelitian kuantitatif	Anggaran dengan variabel Belanja Modal menunjukkan koefisien positif sebesar 1,122 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,013 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.